



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.  
Jabatan : Kepala Biro Persidangan I  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Oni Choiruddin, S.H., M.M.  
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan  
selaku Deputi Bidang Persidangan DPD RI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 2 Januari 2026

**PIHAK KEDUA**



Oni Choiruddin, S.H., M.M.  
NIP. 196804291997031001

**PIHAK PERTAMA**



Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.  
NIP. 197603091995011001



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
BIRO PERSIDANGAN I**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K <sub>1121</sub> )	1,18
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan (K <sub>1221</sub> )	0,27
3	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang ditetapkan (K <sub>1421</sub> )	0,12
4	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan UU (K <sub>2121</sub> )	0,18
		Nilai tertimbang masukan sesuai standar yang ditetapkan atas bahan masukan terhadap RUU Inisiatif DPD RI dan pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah (K <sub>2122</sub> )	1,13
5	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang pengelolaan kerumahtanggaan kerjasama parlemen DPD RI (K <sub>2125</sub> )	0,45
6	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar yang ditetapkan untuk masukan terhadap RUU Inisiatif atas pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU (K <sub>2221</sub> )	0,25
		Nilai tertimbang parameter pengukuran efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemanfaatannya (K <sub>2222</sub> )	0,20
7	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk	Nilai tertimbang aspirasi	0,38

	tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	masyarakat dan daerah yang terhimpun untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda sesuai standar yang ditetapkan (K <sub>2311</sub> )	
8	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan (K <sub>2321</sub> )	0,20
		Nilai tertimbang masukan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah (K <sub>2322</sub> )	0,20

	Kegiatan / RO	Anggaran
<b>A.</b>	<b>Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI</b>	<b>Rp 50.360.873.000</b>
1	001 - RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite I	Rp 11.864.822.000
2	003 - RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Komite III	Rp 11.864.822.000
3	005 - RUU Usul DPD RI Bidang Tugas Panitia Perancang Undang - Undang	Rp 8.134.029.000
4	008 – Rekomendasi Usul Prolegnas	Rp 1.758.410.000
5	006 - Konsep RUU	Rp 3.035.680.000
6	009 - RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite I DPD	Rp 11.888.266.000
7	011 - RUU Hasil Pandangan dan Pendapat Bidang Tugas Komite III DPD	Rp 1.280.425.000
8	007 - RUU Lainnya hasil pertimbangan DPD RI bidang tugas Komite III	Rp 534.419.000
<b>B.</b>	<b>Penyelenggaraan fungsi pengawasan</b>	<b>Rp 36.732.197.000</b>
1	001 - Laporan materi persidangan lingkup Biro Persidangan I	Rp 1.880.000.000
2	003- Laporan Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite I	Rp 1.171.355.000
3	005- Laporan Resolusi permasalahan daerah lingkup tugas Komite III	Rp 502.659.000
4	001 - Rekomendasi Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-undang Bidang Tugas Komite I	Rp 15.143.877.000
5	003 - Rekomendasi Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-undang Bidang Tugas Komite III	Rp 7.317.675.000
6	008 - Rekomendasi atas pemantauan terhadap pelaksanaan UU	Rp 756.696.000
7	009 - Rekomendasi atas hasil peninjauan terhadap pelaksanaan UU	Rp 959.935.000
8	006 - Rekomendasi Atas Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah	Rp 5.055.884.000
9	007 - Rekomendasi Atas Permintaan Daerah tentang Permasalahan Hukum di Daerah	Rp 1.227.545.000
10	013 - Laporan Monitoring tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi Rancangan Perda dan Perda	Rp 2.716.571.000

<b>C.</b>	<b>Pengelolaan kerumahtangaan dan kerjasama parlemen DPD RI</b>	<b>Rp 9.174.578.000</b>
1	001 - Peraturan internal DPD	Rp 395.250.000
2	001 - Kesepakatan antar Parlemen dan Lembaga Internasional	Rp 8.779.328.000

Jakarta, 2 Januari 2026

**DILAK KEDUA**



**DILAK PERTAMA**



Oni Choiruddin, S.H., M.M.  
NIP. 196804291997031001

Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.  
NIP. 197603091995011001